

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUDIDAYA TANAMAN KEDELAI

### *POLICY IMPLEMENTATION OF SOYBEAN CULTIVATION*

**Alhajsyah Husaini\*, Mohammad Ridwan**

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Koresponden email: [alhajsyah1122@gmail.com](mailto:alhajsyah1122@gmail.com)

#### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kelembagaan petani yang belum mampu meningkatkan produksi kedelai di tengah besarnya kebutuhan kedelai dalam negeri setiap tahunnya, sehingga perlu perhatian khusus. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan melalui Budidaya Tanaman Kedelai dan Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Produksi Kedelai di Kecamatan Hinai. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan 4 variabel penting yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Komunikasi yang dilakukan dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik dengan adanya rapat koordinasi yang selalu terjaga. Kemudian, Sumber daya yang dimiliki dalam budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani di Kecamatan Hinai sudah cukup baik termasuk sumber daya manusia yang dimiliki. Namun pada sarana dan prasarana yang dimiliki masih belum optimal dikarenakan masih menggunakan alat-alat tradisional. Selanjutnya, disposisi dan komitmen dari Pemerintah dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai sudah baik karena didukung langsung oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Terakhir, struktur birokrasi yang dimiliki oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dan Kelompok Tani merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai. Standar operasional prosedur (SOP) yang tidak dimiliki Kelompok Tani dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai. Budidaya tanaman kedelai hanya berpedoman dengan intruksi kerja dalam program demplot kedelai.

**Kata kunci:** Budidaya; kedelai; petani; produksi

#### ABSTRACT

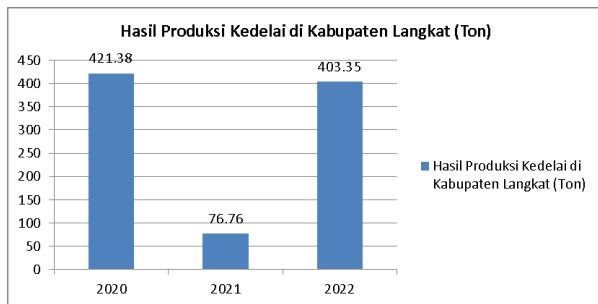
*This research is motivated by farmer institutions that have not been able to increase soybean production in the midst of the large demand for domestic soybeans every year, so special attention is needed. This study aims to see and describe the implementation of policies through soybean cultivation and farmer institutions in increasing soybean production in Hinai District. The research method used in this study is descriptive research with a qualitative approach. Data collection was carried out by interview, observation, documentation, and literature techniques. The data obtained was analyzed qualitatively using 4 important variables, namely: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the communication carried out in increasing soybean production in Hinai District is good with coordination meetings that are always maintained. Then, the resources owned in soybean cultivation and farmer institutions in Hinai District are quite good, including the human resources owned. However, the facilities and infrastructure owned are still not optimal because they still use traditional tools. Furthermore, the disposition and commitment of the Government in increasing soybean production in Hinai District is good because it is directly supported by the Regional Government and Ministries. Finally, the bureaucratic structure owned by the Agricultural Extension Center of Hinai District and Farmer Groups is an important factor in increasing soybean production in Hinai District. Standard operating procedures (SOP) that are not owned by Farmer Groups and the Agricultural Extension Center of Hinai District. Soybean cultivation is only guided by work instructions in the soybean demonstration plot program.*

**Keywords:** Cultivation; soybean; farmer; production

#### PENDAHULUAN

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi daerah strategis sebagai penghasil kedelai dengan potensi yang baik untuk memenuhi kebutuhan kedelai dalam negeri adalah Provinsi Sumatera Utara karena pernah menjadi penghasil kedelai terbesar di Pulau Sumatera. Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 6.273,29 km<sup>2</sup>. Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat merupakan kabupaten penghasil kacang kedelai yang

unggul sejak dulu. Saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Utara sedang fokus untuk mengembalikan kabupaten langkat menjadi penghasil kedelai terbesar di Sumatera Utara dengan upaya menyalurkan bibit-bibit kacang kedelai di berbagai Kecamatan di Kabupaten Langkat. Walaupun demikian, penurunan produksi kedelai di Kabupaten Langkat tetap terjadi. Berikut disajikan hasil produksi kedelai di Kabupaten Langkat periode panen 2020-2022.



**Gambar 1.** Grafik Hasil Produksi (Ton) Kedelai di Kabupaten Langkat (2020-2022)

Berdasarkan data dan gambar grafik hasil produksi panen kedelai di Kabupaten Langkat pada periode panen tahun 2020 sampai 2022 mengalami fluktuasi. Penurunan produksi kedelai yang terjadi mengakibatkan kurangnya pasokan kedelai yang dihasilkan Kabupaten Langkat sehingga tidak mampu menjadikan kemandirian pangan yang dahulunya pernah menjadi sentra kedelai terbesar dan terbaik di Sumatera.

Pentingnya peningkatan produksi kedelai di sektor pertanian ini telah didorong oleh presiden Joko Widodo (Dilansir melalui setkab.go.id 2022). Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Langkat juga selaras dengan amanat Presiden Republik Indonesia yang optimis untuk mengembalikan Kabupaten Langkat menjadi sentra kedelai di Sumatera Utara. Pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat bertanggungjawab dalam peningkatan dan penurunan produksi kedelai yang terjadi khususnya di Kecamatan Hinai. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sedang fokus untuk mengembalikan Kabupaten Langkat menjadi penghasil kedelai terbesar di Sumatera Utara dengan upaya menyalurkan bibit-bibit kacang kedelai di berbagai Kecamatan di Kabupaten Langkat.

Dari 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, Kecamatan Hinai merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Langkat yang paling menonjol produksi kedelainya. Kecamatan Hinai memiliki total luas 105,26 km<sup>2</sup> dengan luas lahan pertanian sebesar 94,38 km<sup>2</sup>. Sejak dulu, Kecamatan Hinai merupakan penghasil kedelai yang berkualitas di Kabupaten Langkat. Kecamatan Hinai memiliki petani yang tergabung dalam 5 kelompok tani dengan luas lahan 150 hektare. Namun, sejak tahun 2019 produksi kedelai di Kecamatan Hinai mengalami penurunan yang sangat drastis. Dari penurunan produksi, terdapat indikasi bahwa adanya permasalahan produksi kedelai di Kecamatan Hinai yang mengakibatkan penurunan produksi kedelai di tengah besarnya permintaan kedelai nasional.

Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan produksi kedelai di Kecamatan Hinai menjadi kurang optimal. Salah satu faktor yang menjadi permasalahan utama terkait kurang optimalnya produksi kedelai yaitu kekeringan dan banjir. Hal ini membuat benih yang dimiliki petani tidak tumbuh secara optimal. Selain kekeringan dan banjir, adanya faktor pembatas pada budidaya tanaman sehingga sulitnya mendapatkan bibit yang unggul membuat produktivitas tanaman kedelai stagnan atau kurang optimal. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat melalui Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah harus mampu mengatasi faktor permasalahan yang ada sehingga bisa mendorong pertumbuhan tanaman dan meningkatkan produktivitas tanaman kedelai di Kecamatan Hinai.

Permasalahan penurunan produksi kedelai di Kecamatan Hinai juga menjadi sebuah tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Langkat kedepan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan menyediakan pangan serta keseimbangan gizi bagi masyarakat. Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan permasalahan petani kedelai di Kecamatan Hinai bahwa hama menjadi salah satu faktor yang membuat kedelai menjadi keriting, pupuk yang sulit didapatkan dan harganya yang tinggi, perawatan yang sulit dikarenakan kurangnya pemberdayaan petani kedelai, harga jual yang rendah, keterbatasan benih, dan kurangnya tenaga penyuluh pertanian serta kurang efektifnya keterlibatan langsung pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi petani kedelai.

Harga jual yang rendah serta kurangnya pemberdayaan petani terkait edukasi pengendalian hama, keterbatasan pupuk yang mahal dan masih kurang aktifnya keterlibatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat yang seharusnya mampu memecahkan, mengatasi keterbatasan dan tantangan petani kedelai secara langsung di lapangan menjadi permasalahan yang di keluhkan para petani kedelai di Kecamatan Hinai. Dalam hal ini terlihat bahwa permasalahan utama budidaya tanaman kedelai dan kelembagaan petani dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai adalah lemahnya struktur birokrasi yang tidak berjalan teratur sesuai standar operasional prosedur (SOP) sehingga terdapat kendala-kendala seperti uraian penjelasan diatas.

Adi et al., (2018) dengan judul "Peran Dinas Pertanian Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Di Kelurahan Lempake". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Pertanian Kota Samarinda dalam meningkatkan produksi pertanian di Kelurahan Lempake, serta melihat terapan peran tersebut

dalam setiap tahapannya mulai dari, tujuan, perencanaan, kegiatan, pesan, media, sampai dengan hasil. Sumber data diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan tentang variabel yang diteliti. Analisis data model interaktif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerderhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Selanjutnya penelitian oleh Maghfiroh et al., (2021) dengan judul "Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam meningkatkan kesejahteraan petani beserta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Untuk mengetahuinya digunakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran implementasi kebijakan berupa program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO) yang sudah diterapkan. Serta, pemberian pupuk subsidi, benih tanaman dan alat pertanian juga sudah terealisasi.

Selanjutnya penelitian oleh Wahyuni, (2023) dengan judul "Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Peningkatan Produksi Arabika". Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan peningkatan produksi kopi arabika dengan menjelaskan faktor keberhasilan implementasi kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara serta dokumentasi.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Adapun penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hinai. Pemilihan lokasi ini dikarenakan masih ditemukannya beberapa masalah dalam produksi kedelai. Terkait masalah ini akan diteliti untuk mengetahui Peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian diantaranya adalah dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka, serta dokumentasi.

Pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara purposive sampling. Alasan menggunakan purposive sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti, oleh karena itu peneliti memilih purposive sampling yang menetapkan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun teknik analisis data menggunakan alangkah-langkah seperti pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang Budidaya Tanaman Kedelai dan Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Produksi Kedelai di Kecamatan Hinai. Peneliti berusaha untuk menggali, melihat dan kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Melalui teori Implementasi Kebijakan dari C. Edward III akan dikaji berbagai masalah yang berkaitan dengan Budidaya Tanaman Kedelai dan Kelembagaan Petani Dalam Peningkatan Produksi Kedelai di Kecamatan Hinai.

### 1. Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani yaitu organisasi petani yang ada di Kecamatan Hinai yang dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan dari kebijakan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Kecamatan Hinai mempunyai organisasi kelompok tani dan merupakan kelembagaan pendukung yang sangat memiliki peran penting dalam pencapaian dibidang pertanian.

**Tabel 1.** Kondisi Lingkungan di Kecamatan Hinai

| Jenis informasi           | Keterangan                    |
|---------------------------|-------------------------------|
| Ketersedian Air           | Kurang (Tadah Hujan & Sungai) |
| Ketersediaan Tenaga Kerja | Cukup                         |
| Status Penggunaan Lahan   | Pemilik dan Penggarap         |
| Respon Petani             | Cukup                         |
| Aktifitas Kelompok Tani   | Baik                          |
| Aksesibilitas Lokasi      | Cukup Baik                    |
| Keberadaan Saprodi        | Cukup                         |
| Lembaga Pengolahan        | RMU                           |
| Lembaga Pemasaran         | Pedagang Pengumpul            |
| Lembaga Keuangan          | BRI dan BPR                   |

Kondisi sumber daya untuk lingkungan usaha tani di Kecamatan Hinai dapat dilihat dari tabel diatas yang menunjukkan bahwa sumber daya untuk lingkungan usaha tani di Kecamatan Hinai sudah cukup memadai dengan tersedianya beberapa sumber daya yang menunjang kegiatan usaha tani. Pelaku utama dan pelaku usaha sesungguhnya membutuhkan adanya teknologi yang bersifat prak-

tis dan bisa diterapkan sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Tumbuhnya kelompok tani yang kuat dan mandiri untuk para petani kedelai umumnya didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama. Penumbuhan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dapat dimulai dari kelompok-kelompok/organisasi yang ada di masyarakat. Melalui kegiatan penyuluh pertanian diarahkan menuju bentuk kelompok tani yang semakin terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama dalam meningkatkan produktivitas dari usaha tani kedelai.

Pengembangan kelompok tani diarahkan pada peningkatan kemampuan anggota dalam melaksanakan fungsinya, peningkatan kemampuan para anggota dalam pengembangan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Peningkatan kemampuan dimaksudkan agar kelompok tani dapat berfungsi sebagai kelas belajar, tempat kerja sama dan unit produksi yang dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, fungsi kelompok sebagai kelas belajar yaitu kelompok tani merupakan sebuah wadah belajar mengajar untuk anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera. Kedua, fungsi kelompok sebagai tempat kerjasama dimana kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha taninya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan.

Ketiga, fungsi kelompok sebagai unit produksi yaitu usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Selanjutnya kelompok tani yang berkembang bergabung ke dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan). Penggabungan kelompok tani ke dalam Gapoktan ditujukan agar kelompok tani lebih berdaya guna dan berhasil guna melalui pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan kelompok tani.

## 2. Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan/kebijakan terkait budidaya tanaman kedelai. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari sebuah pelaksanaan. Pelak-

sanaan yang efektif dapat terwujud apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi berjalan dengan baik juga.

Komunikasi antara Dinas Pertanian/koordinator Balai Penyuluhan Pertanian dengan bawahannya dan para kelompok tani sangat efektif, kegiatan yang dilakukan petani didukung dan aspirasi kelompok tani di serap dengan baik.



**Gambar 2.** Sosialisasi Pelatihan Kelompok Tani

Gambar di atas memperlihatkan sosialisasi yang dilakukan oleh Balai Penyuluhan Pertanian yang memberikan pelatihan kepada kelompok tani melalui Penyuluh Pertanian Lapangan dan menyerap aspirasi-aspirasi para kelompok tani guna meningkatkan kompetensi petani serta mengatasi permasalahan yang ada.

Program dari pemerintah yang telah dilaksanakan oleh Balai Penyuluhan Pertanian sebagai perpanjangan tangan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat di Kecamatan Hinai adalah *ouput* dari hasil laporan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Peneliti melihat bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berjalan dengan baik melalui Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai kepada kelompok tani dan gabungan kelompok tani kedelai. Namun pada proses selanjutnya untuk dikomunikasikan kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani masih dirasa kurang.

## 3. Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor yang penting dalam sebuah pelaksanaan kegiatan/program peningkatan produksi kedelai. Tidak hanya sumber daya manusia saja, melainkan sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya. Sumber daya manusia yang ada pada kelembagaan

pertanian di Kecamatan Hinai dalam menunjang peningkatan produksi pertanian khususnya di bidang tanaman kedelai yang dimiliki seperti Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.

Luas lahan yang dimiliki para petani juga menjadi salah satu sumber daya yang mempengaruhi jumlah produksi kedelai di Kecamatan Hinai. Fasilitas yang kurang memadai juga teknologi yang belum mampu diterapkan dalam menanam kedelai menyebabkan petani sulit untuk berkembang dan maju sehingga terpaksa menggunakan cara tradisional.

Keragaan alat mesin pertanian di Kecamatan Hinai yang merupakan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan produksi pertanian khususnya kedelai. Ketersediaan alat yang modern dalam membantu para petani sangatlah minim dan belum optimal. Kondisi fasilitas di Kecamatan Hinai dalam kegiatan yang dilakukan petani kedelai masih belum optimal dikarenakan banyaknya para petani yang menggunakan alat-alat pertanian tradisional dan sering kali terkendala oleh faktor iklim yang seharusnya bisa diatasi dengan adanya teknologi modern.

Kecamatan Hinai dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai memiliki sumber daya manusia yang mampu meningkatkan produksi kedelai di Kecamatan Hinai. Namun sebaik apapun sumber daya manusia yang dimiliki akan sulit mencapai sebuah tujuan apabila masih terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia. Karena dalam pelaksanaannya memerlukan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana, prasarana dan kemudian pelatihan melalui penyuluhan pertanian. Sumber daya ini sangat penting untuk saling melengkapi, jika terdapat kekurangan pada salah satunya maka akan menghambat proses pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

#### 4. Disposisi

Disposisi dari segi administrasi adalah pandangan pejabat terhadap hal-hal yang diangkat dalam surat dinas, yang diungkapkan pada surat yang bersangkutan atau pada halaman tersendi (Husni et al., 2024). Disposisi/sikap pelaksana merupakan faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kelembagaan petani dalam produksi kedelai. Sikap pelaksana yaitu bagaimana komitmen dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Apabila sikap pelaksana memiliki sikap yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya jika sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat

kebijakan, maka proses peningkatan produksi kedelai juga tidak akan berjalan efektif.

Komitmen yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan kelembagaan petani untuk mendorong upaya peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai. Penyaluran bantuan pupuk dan bibit kedelai di Kecamatan Hinai kepada Kelompok Tani. Adapun bantuan yang diberikan kepada Kelompok Tani Makmur dengan luas lahan 5 ha, Kelompok Tani Serasi dengan luas 50 ha, Gabungan Kelompok Tani Sepakat dengan luas 15 ha dan Gabungan Kelompok Tani Cinta Damai dengan luas lahan 150 ha.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan produksi kedelai di Kabupaten Langkat merupakan suatu langkah yang baik khususnya di Kecamatan Hinai yang merupakan lokasi gerakan tanaman kedelai dengan jumlah luas tanam terbesar di Kabupaten Langkat. Terlihat di gambar gerakan mendukung peningkatan produksi kedelai dihadiri oleh pemerintah setempat dan Kelompok Tani.

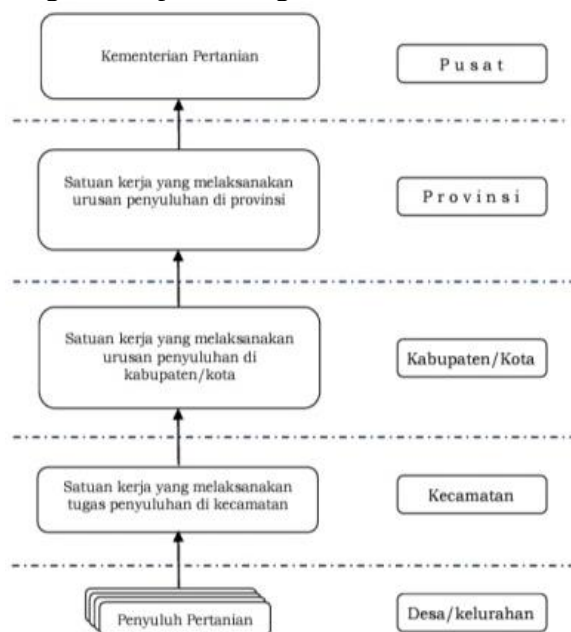
#### 5. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi merupakan suatu penetapan tentang bagaimana tugas dan pekerjaan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinir secara formal. Menurut George C. Edward III, meskipun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu tujuan kebijakan tersedia atau para pelaksana sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan memiliki keinginan untuk mencapai tujuan yang baik. Kemungkinan tujuan tersebut tidak dapat terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yakni: "*Standart Operational Procedure dan Fragmentasi*".

Suatu kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik apabila terdapat kelemahan dalam struktur birokrasinya. Aspek dalam pelaksanaannya merupakan mekanisme yang biasanya sudah dibuat Standart Operating Procedure (SOP) yang menjadi pedoman untuk setiap pelaksana dalam bertindak agar pelaksanaan kebijakan tidak melenceng jauh dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu harus sesuai dengan SOP.

Organisasi kelembagaan petani dalam menjalankan kegiatan seharusnya menggunakan standar operasional prosedur yang efektif dan efisien agar dapat menghasilkan produksi kedelai yang baik dan meningkat. Kemudahan dan kejelasan terkait isi dari standar operasional prosedur yang disusun mudah dimengerti dan tidak menimbulkan banyak penafsiran sehingga penyuluh pertanian lapangan dan petani akan dengan mudah dalam memahami tugas dan peranannya.

Penyuluh pertanian lapangan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan dalam budidaya tanaman kedelai sudah sesuai dengan intruksi kerja dari atas. Namun dalam pelaksanaan budidaya tanaman kedelai belum memiliki SOP resmi yang ditetapkan baik oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai ataupun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.



**Gambar 3.** Laporan Alur Pembinaan dan Pelaksanaan Demplot Kedelai

Gambar di atas merupakan laporan alur pembinaan kelembagaan petani dan pelaksanaan demplot tanaman kedelai yang akan dilaporkan ke Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Hinai selanjutnya ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat kemudian dilaporkan sampai ke pusat. Adapun isi dari laporan tersebut adalah jenis tanaman, varietas, pupuk, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan terkait proses penanaman kedelai dari awal hingga panen dan kelembagaan petani yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dalam melaksanakan kegiatan budidaya tanaman kedelai memberikan pelatihan kepada kelompok tani sesuai dengan pedoman-pedoman teknis dalam kegiatan produksi kedelai. Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam budidaya tanaman kedelai belum ada karena pedoman yang ada dalam kelembagaan petani kedelai hanya intruksi kerja berdasarkan arahan dari atas. SOP akan berjalan dengan baik apabila dilakukan pengujian rutin terkait prosedur yang ada dan disesuaikan dengan SOP milik Balai Penyuluhan Pertanian dan kelembagaan petani dalam budidaya tanaman kedelai di Kecamatan Hinai. SOP yang tidak jelas pada struktur organisasi kelembagaan petani kedelai di Ke-

camatan Hinai belum memberikan penjelasan yang efektif. Di karenakan memang tidak adanya bentuk dari SOP tersebut yang seharusnya dijalankan dalam kegiatan produksi kedelai.

Pengamatan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan pada tanaman kedelai milik petani yang rutin dilaksanakan setiap minggunya dari awal proses penanaman hingga proses pemanenan kedelai di Kecamatan Hinai. Adapun pengamatan yang dilakukan adalah persiapan lahan, persiapan benih, pemupukan, penyiangan, hama dan penyakit hingga panen.

Penerapan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu ataupun suatu kelompok di dalam organisasi berdasarkan keputusan yang telah dibuat agar tercapainya sebuah tujuan. Proses penerapan Standart Operetional Procedure (SOP) dalam kegiatan yang dilaksanakan terkait produksi kedelai di Kecamatan Hinai sangatlah dibutuhkan agar dapat menciptakan kinerja yang lebih efesien.

**Tabel 2.** Harga Komoditi di Kecamatan Hinai

| No | Komoditi                 | Harga       |
|----|--------------------------|-------------|
| 1  | Padi (GKP)               | Rp. 20.000  |
| 2  | Jagung (PPIL)            | Rp. 18.000  |
| 3  | Kedelai (GKP)            | Rp. 18.000  |
| 4  | Beras Premium (KG)       | Rp. 25.000  |
| 5  | Beras Medium (KG)        | Rp. 25.000  |
| 6  | Cabe Besar (KG)          | Rp. 60.000  |
| 7  | Cabe Kecil (KG)          | Rp. 40.000  |
| 8  | Bawang Putih (KG)        | Rp. 40.000  |
| 9  | Bawang Merah (KG)        | Rp. 30.000  |
| 10 | Gula Pasir (KG)          | Rp. 18.000  |
| 11 | Minyak Goreng (KG)       | Rp. 16.000  |
| 12 | Daging Sapi (KG)         | Rp. 125.000 |
| 13 | Daging Ayam Kampung (KG) | Rp. 25.000  |
| 14 | Daging Ayam Ras (KG)     | Rp. 25.000  |
| 15 | Telur Ayam (KG)          | Rp. 27.000  |
| 16 | Telur Itik (KG)          | Rp. 30.000  |
| 17 | Terong                   | Rp. 7.000   |
| 18 | Kacang Panjang           | Rp. 10.000  |
| 19 | Gambas                   | Rp. 6.000   |
| 20 | Tomat                    | Rp. 10.000  |
| 21 | Timun                    | Rp. 10.000  |

Dari tabel di atas memperlihatkan harga-harga komoditi di Kecamatan Hinai khususnya kedelai yang memiliki harga jual Rp. 18 ribu/kg di pasaran. Namun para petani kedelai di Kecamatan Hinai dalam menjual hasil tanaman kedelainya hanya Rp. 10-12 ribu/kg tergantung kualitas kedelainya itu sendiri. Adapun yang menyebabkan harga jual yang rendah milik petani yaitu kualitas kedelai, tengkulak, pelaku usaha produk olahan dan pengaruh kedelai impor.

Selanjutnya dalam setiap bagian individu harus sesuai dengan fungsinya didalam organisasi agar memiliki keselarasan dan terhindar dari kesalahannya dalam bekerja. Seperti yang disampaikan

oleh penyuluh pertanian lapangan yang seharusnya memiliki peranan penting dalam mencapai suatu tujuan kegiatan pertanian bagi para petani kedelai masih kurang optimal.

Tugas yang dilaksanakan sudah cukup baik sesuai dengan pedoman kegiatan demplot kedelai. Standar Operasional Prosedur belum dimiliki oleh Balai Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Tani. Pembagian tugas juga belum maksimal dikarenakan kurangnya tenaga penyuluh dan kemampuan penyuluh di bidang tanaman kedelai yang masih kurang maksimal. Namun karena adanya intruksi kerja dalam kegiatan demplot kedelai yang dilaksanakan terstruktur sudah memberikan dampak yang cukup baik sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Seperti pelaksanaan pemberian pupuk, hama dan benih yang cukup optimal dikarenakan adanya pedoman dalam kegiatan demplot walaupun Standar Operasional Prosedur belum diterapkan secara efektif antara para petani dengan pemerintah. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian lapangan dan tidak adanya tenaga ahli di bidang kedelai dapat mengakibatkan sulitnya peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai.

## KESIMPULAN

Kelembagaan petani dalam peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai belum menunjukkan kearah yang lebih baik. Hal ini dikarenakan proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada para petani yang tergabung dalam kelompok tani masih dirasa kurang karena para petani kedelai yang terdaftar didalam kelompok tani belum dapat terjangkau dengan baik. Selain itu masih terbatasnya sarana prasarana, sehingga sebaik apapun sumber daya manusia yang dimiliki akan sulit mencapai sebuah tujuan. Kemudian dalam pelaksanaan budidaya tanaman kedelai di Kecamatan Hinai belum menerapkan dan memahami bahwa pentingnya struktur organisasi dijalankan sesuai dengan tugas dan standar operasional prosedur antara para petani dan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Hinai dalam proses budidaya tanaman kedelai. Budidaya tanaman kedelai yang dilaksanakan belum menggunakan Standar Operasional Prosedur dan pembagian tugas belum sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Seperti pelaksanaan pemberian pupuk, hama dan benih yang tidak optimal dikarenakan tidak adanya Standar Operasional Prosedur yang sesuai milik petani dengan milik pemerintah. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian lapangan dan tidak adanya tenaga ahli di bidang kedelai mengakibatkan sulitnya peningkatan produksi kedelai di Kecamatan Hinai yang hanya berpedoman pada intruksi kerja yang diberikan oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, F. N., Jamal, M., & Surya, I. (2018). Peran Dinas Pertanian Kota Samarinda Dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Di Kelurahan Lempake. *Program Studi Ilmu Pemerintahan*.
- Agustian, D., Patiung, M., Rembu, Y., Nur, M., Ode, S., & Regif, S. Y. (2023). Network Governance dalam Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 63-70.
- Andayanie, W. R. (2016). *Pengembangan produksi kedelai sebagai upaya kemandirian pangan di Indonesia*.
- Hafni, R., Rs, P. H., & Rezeki, D. (2022). Analisis Permintaan Komsumsi Kedelai di Indonesia. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu*, 3(1), 250–264. [www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)
- Handayani, L. (2019). Analisis daya saing kedelai lokal di Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Hasil ...*, 1113–1117. <https://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/326%0Ahttps://e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/326/326>
- Husni, M. F., Jabbar, A., & Yasin, A. (2024). Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Untuk Meningkatkan Citra Positif*, 10(3), 1–9.
- Ilmi, M. B., Prayuginingsih, H., & Aulia, A. N. (2023). Analisis Trend Produksi Pajale (Padi, Jagung dan Kedelai) di Kabupaten Jember. *Agri Analytics Journal*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.47134/agri.v1i1.1861>
- Kardiyono, Marimin, M., Indastri, N. S., Yuliasih, I., & Pramuhadi, G. (2018). Strategi Peningkatan Produktivitas Dan Kualitas Kedelai Lokal Dengan Pendekatan Produktivitas Hijau. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 28(3), 343–354. <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2018.28.3.343>
- Kaspul, K., & Zulkarnaini, Z. (2022). Implementasi Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. *Policy and Social Review*, 2(1), 33-36.
- Laili, B. S., Utomo, D. T., & Wijanarko, D. (2023). Implementasi Metode Backpropagation Neural Network Dalam Memprediksi Hasil Produksi Kedelai. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Terapan*, 10(1), 1–6. <https://doi.org/10.25047/jtit.v10i1.145>
- Maghfiroh, R., Ati, N. U., & Sunariyanto. (2021). Implementasi Kebijakan Dinas Ketahanan

- Pangan Dan Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. *Jurnal Respon Publik*, 15(4), 67–74.
- Mas'ud, & Wahyuningsih, S. (2023). Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2023. *Pusat Data Dan Sistem Informasi Pertanian*, 47.
- Nugroho, R., & Asmorowati, S. (2024). Implementasi Kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 92-101.
- Pambudi, A. R. (2021). Kewajiban pemenuhan ketersediaan jagung untuk penjaminan ketahanan pangan nasional. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 49–54. <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7927>
- Putri, A. S., & Wibisono, B. H. (2022). Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 323-330.
- Quirinno, R. S., Murtiana, S., & Asmoro, N. (2024). Peran Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Dan Ekonomi Nasional 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(7), 408–420.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA.
- Sumartono, S., Yuliani, F., & Zulkarnaini, Z. Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Penggerak Tingkat Sma Di Kabupaten Rokan Hilir. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 22(1), 65-77.
- Wahyuni, W. (2023). Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Aceh Tengah Terhadap Peningkatan Produksi Kopi Arabica. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu ...*, 8(4), 1–12. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/27689%0Ahttps://jim.usk.ac.id/FISIP/article/download/27689/13013>